

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

[illegible]

19	Tahu Mentah 1 Kg	Rp 11,000	Rp 11,000	Rp 11,000	Rp 11,000	Rp 11,000	Rp 11,000	0.00
20	Pisang 1 Kg	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 6,000	0.00
21	Susu Balita (SGM) 400Gr	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	0.00
22	Jeruk 1 Kg	Rp 18,000	Rp 18,000	Rp 17,000	Rp 17,000	Rp 18,000	Rp 22,000	0.22

Berdasarkan dari data survey harga kebutuhan pokok pada Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar) di Pasar Banjar, pada Bulan Januari - Maret 2025 dapat disampaikan secara umum terjadi fluktuasi harga pada sejumlah komoditas pangan pokok dan penting di Indonesia. Bahwa sebagian besar komoditas mengalami perubahan harga yang cukup signifikan, terutama pada kelompok hortikultura. Sementara yang lain mengalami penurunan. Namun, ada juga beberapa komoditas yang harganya relatif stabil. Perubahan harga ini dihitung berdasarkan perbandingan harga di awal bulan Januari dengan harga di akhir bulan Maret.

a. Komoditas dengan kenaikan signifikan

Komoditas yang mengalami lonjakan harga terbesar selama periode ini adalah bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit merah. Harga bawang merah meningkat drastis dari Rp32.000 pada Januari (M4) menjadi Rp55.000 pada Maret (M4), yang berarti terjadi kenaikan sebesar 71,87%. Kenaikan ini disusul oleh cabai merah yang naik 50% dan cabai rawit merah sebesar 57,14%. Kenaikan harga yang tajam pada komoditas ini diduga dipengaruhi oleh faktor musim panen yang belum optimal, distribusi yang terhambat, serta meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadhan. Selain itu, harga bawang putih juga naik dari Rp42.000 menjadi Rp48.000 (M4), sedangkan harga jeruk naik dari Rp18.000 menjadi Rp22.000 (M4), menunjukkan peningkatan sebesar 22,22%.

b. Komoditas dengan Harga stabil

Beberapa komoditas menunjukkan kestabilan harga selama triwulan I ini. Antara lain :

- Beras premium: stabil di harga Rp16.000 per kilogram.
- Minyak goreng kemasan: tetap di harga Rp17.000 per liter.
- Susu bubuk, tempe, tahu, pisang, udang, dan susu balita (SGM) juga menunjukkan tidak ada perubahan harga yang signifikan.

Stabilitas harga ini menunjukkan bahwa pasokan untuk komoditas-komoditas tersebut relatif terjaga dengan baik dan tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika pasar musiman.

c. Komoditas dengan penurunan harga

Penurunan harga tercatat pada:

- Minyak goreng curah: turun dari Rp20.500 menjadi Rp19.000 (M4), atau sekitar -7,32%.
- Daging ayam broiler: turun dari Rp33.000 menjadi Rp32.000 (M4), atau -3,03%.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh membaiknya distribusi dan pasokan atau menurunnya permintaan pasar dalam periode tersebut.

d. Tren Bulanan

Secara bulanan, terlihat adanya lonjakan harga mulai dari Februari ke Maret, terutama pada komoditas hortikultura. Hal ini mengindikasikan potensi tekanan inflasi dari sektor pangan yang perlu diantisipasi, terutama menjelang bulan-bulan besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

e. Komoditas Pangan dengan Risiko Tinggi ke depan

- Bawang Merah -> Komoditas ini menunjukkan lonjakan harga paling tajam sepanjang triwulan, dari Rp32.000 (M4 Januari) menjadi Rp55.000 (M4 Maret), atau naik sebesar 71,87%. Kenaikan terjadi konsisten tiap bulan, yang menandakan adanya gangguan pasokan atau distribusi. Faktor risiko : Produksi musiman dan terpusat di wilayah tertentu, Ketergantungan pada kondisi cuaca & Rentan gangguan distribusi dan tidak tahan lama
- Cabe Merah -> Harga cabe merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp75.000 dalam periode yang sama, dengan kenaikan 50%. Lonjakan serupa juga terjadi pada cabe rawit merah, yang naik dari Rp70.000 menjadi Rp110.000 (+57,14%). Komoditas cabai cenderung mengalami lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan atau musim hujan, sehingga perlu kewaspadaan tinggi. Faktor risiko ke depan : Siklus tanam pendek dan tidak seragam antar daerah, Rentan terhadap serangan hama dan curah hujan dan Permintaan melonjak jelang Ramadhan dan Lebaran

f. Kesimpulan

Triwulan I tahun 2025 menunjukkan dinamika harga yang cukup beragam. Kenaikan signifikan terjadi pada kelompok bumbu dapur seperti bawang dan cabai, sedangkan kelompok pangan strategis seperti beras, tempe, tahu, dan minyak goreng kemasan cenderung stabil. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan rantai pasok terutama untuk komoditas dengan volatilitas tinggi, guna menjaga daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Faktor Cuaca dan Musim, data menunjukkan fluktuasi harga yang signifikan pada komoditas cabai merah dan bawang merah. Harga cabai merah, misalnya, berfluktuasi dari Rp50.000 menjadi Rp75.000, selanjutnya harga bawang merah naik dari Rp. 32.000 menjadi Rp. 55.000 Pada Triwulan I 2025, beberapa wilayah di Indonesia mengalami perubahan cuaca ekstrem, termasuk curah hujan tinggi dan banjir di beberapa sentra produksi cabai dan bawang merah.
2. Rantai Pasok yang Tidak Efisien: Perbedaan harga yang cukup besar antara harga di tingkat produsen (petani) dan harga di tingkat konsumen mengindikasikan adanya masalah dalam rantai pasok. Beberapa berita pada periode ini menyoroti masalah infrastruktur yang kurang memadai, biaya transportasi yang tinggi, dan praktik penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
3. Daya Beli Masyarakat: Kenaikan harga beberapa komoditas, seperti beras medium dan

premium, dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa berita lokal menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Fluktuasi harga yang tinggi pada beberapa komoditas menunjukkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga. Beberapa berita menyoroti adanya perbedaan pandangan antar instansi terkait solusi pengendalian harga pangan.
5. Ekspektasi Inflasi: Kenaikan harga beberapa komoditas dapat memicu ekspektasi inflasi di kalangan masyarakat. Beberapa berita lokal melaporkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi inflasi akibat kenaikan harga pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- a. Selasa Pasar Hasil Tani (Sapa Hati) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada triwulan I dilaksanakan sebanyak 1 kali (18 Maret 2025), konsep membuka pasar bagi para petani yaitu dalam rangka mempertemukan petani dengan konsumen. Ada berbagai komoditas yang ditawarkan oleh petani dalam kegiatan ini, mulai dari Cabe, bawang, beras dan aneka macam komoditas penyumbang inflasi. Yang tentunya komoditas yang dijual diacara ini memiliki harga yang lebih murah ketimbang harga pasar. Leading Sektor Jumpa Hati ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- b. Operasi Pasar Murah (OPM) pada triwulan I dilaksanakan sebanyak 4 kali pada tanggal 11, 13, 18 dan 20 Maret 2025. Operasi Pasar Murah (OPM) merupakan salah satu strategi intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Di Kota Banjar sendiri pelaksanaan OPM memiliki peran penting, khususnya dalam menghadapi periode rawan inflasi
- c. Operasi Pasar Murah Bersubsidi (Opadi) triwulan I dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tanggal 21 Maret 2025 yang dilaksanakan di 4 kecamatan secara serentak. Operasi Pasar Murah Bersubsidi sebagai upaya konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, khususnya menjelang periode rawan inflasi. Pelaksanaan program ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial, perlindungan daya beli masyarakat, dan pengendalian inflasi daerah.
- d. Pemantauan harga di pasar tradisional dilaksanakan setiap hari senin s.d jum'at dengan pasar pantauan yaitu Pasar Banjar.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah dan mendorong kemandirian sektor pertanian, Pemerintah Kota Banjar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan kegiatan Penanaman Bibit Jagung pada hari Jum'at, 28 Februari 2025.
- b. Kegiatan Pakarangan Sagala Aya (PAKAYA-P2L) yang menjadi program unggulan dari Kota Banjar à Program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui penanaman cabai rawit dan komoditas pangan penyumbang inflasi di lahan pekarangan KWT maupun masyarakat umum. Dengan tujuan antara lain ; Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, Pemenuhan kebutuhan pasokan cabai rawit di Kota Banjar sehingga sedikit demi sedikit mengurangi pasokan dari luar Kota Banjar.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pemantauan ketersediaan bahan pangan pokok tingkat distributor merupakan bagian penting dari upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga di daerah. Selama Triwulan I tahun 2025, Dinas KUKMP dan Dinas KP3 Kota Banjar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar telah melakukan observasi dan pengumpulan data lapangan terhadap stok dan distribusi pangan pada tingkat distributor dan pedagang pasa

4. Komunikasi Efektif

- a. High Level Meeting Pemerintah Kota Banjar dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Pj. Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar perihal pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pada triwulan I 2025 (20 Januari 2025, 10 Februari dan 18 Maret 2025) . Pada triwulan I ini baik Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar menginstruksikan agar memperhatikan penyebab terjadinya inflasi di Kota Banjar. Jangan sampai penyebab inflasi di Kota Banjar membuat daya beli masyarakat yang menurun.
- b. Pelaksanaan Sidak Pasar di Kota Banjar selama triwulan I dilaksanakan sebanyak 6 kali (06 & 24 Januari, 03 & 24 Februari, 07 & 27 Maret 2025) dengan tujuan untuk memantau ketersediaan stok komoditas pangan pokok, sidak pasar pun dilakukannya untuk memastikan keamanan pangan yang dijual di pasar. Adapun leading sector sidak pasar sendiri yaitu dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Dinas KP3
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- d. Pelaporan harga pangan secara harian melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Silinda) Jabar, Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawas Pagi) dan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)
- e. Publikasi data harga bahan kebutuhan pokok di media sosial dan Papan running text yang ada di depan alun-alun Kota Banjar.
- f. Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga (K1)

- a. Upaya intervensi pasar (Sapa Hati dan GPM) memiliki potensi untuk meningkatkan keterjangkauan harga, tetapi efektivitasnya terbatas karena hanya dilaksanakan sebulan sekali
- b. Evaluasi efektivitas Sapa Hati, OPM dan GPM secara lebih mendalam, termasuk cakupan, dampak terhadap harga pasar, dan keberlanjutan. Pertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi atau cakupan program intervensi pasar, terutama untuk komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga.

2. Ketersediaan Pasokan (K2)

- a. Program PAKAYA-P2L merupakan langkah positif untuk meningkatkan kemandirian pangan lokal, tetapi dampaknya belum terasa signifikan dalam jangka pendek.
- b. Fokus pada perluasan dan penguatan program PAKAYA-P2L, termasuk pendampingan, pelatihan, dan penyediaan bibit yang berkualitas. Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kontribusi PAKAYA-P2L terhadap pasokan pangan lokal.

3. Kelancaran Distribusi (K3)

- a. Perlu Bekerja sama dengan daerah penghasil agar dapat menutupi stok bahan pangan yang cenderung stoknya sedikit di triwulan I Kota Banjar

4. Komunikasi Efektif (K4)

- a. Pemerintah Kota Banjar telah melakukan upaya yang baik dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengawasan pasar.
- b. Tingkatkan kualitas dan diseminasi informasi harga, termasuk analisis penyebab fluktuasi harga dan rekomendasi bagi konsumen dan pelaku pasar. Perkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian inflasi.
- c. Lebih peka dengan data yang ada di lapangan, dimana selama triwulan I Kota Banjar mengalami inflasi, sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam rangka mengatasi inflasi ini, karena bisa membuat konsumen atau masyarakat merugi dengan harga yang semakin naik.
- d. Penyediaan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terkoordinasi sehingga menghasilkan satu data harga di tingkat konsumen (pasar tradisional) atau bahkan harga ditingkat Distributor.
- e. Rapat koordinasi ditingkat teknis perlu dilakukan lebih rutin dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholder terkait lainnya

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah Kota Banjar perlu bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengadakan Sapahati, OPM dan GPM sehingga dapat meningkatkan frekuensi pelaksanaannya.
2. Pemerintah Kota Banjar perlu memperluas dan memperkuat program PAKAYA-P2L, dengan memberikan pendampingan intensif, pelatihan yang relevan, dan penyediaan bibit berkualitas kepada masyarakat.
3. Identifikasi dan atasi hambatan dalam rantai pasok dan distribusi pangan, seperti infrastruktur yang kurang memadai, biaya transportasi yang tinggi, atau praktik spekulasi yang merugikan.
4. Penting untuk bekerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan untuk memastikan pasokan tetap stabil, terutama untuk komoditas yang stoknya cenderung sedikit di Kota Banjar.
5. Pemerintah Kota Banjar perlu meningkatkan kualitas dan diseminasi informasi harga, termasuk analisis penyebab fluktuasi harga dan rekomendasi bagi konsumen serta pelaku pasar.
6. Perkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian inflasi, termasuk Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas KP3, Bank Indonesia, dan BPS.
7. Lebih peka terhadap data yang ada di lapangan, terutama terkait inflasi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian yang dialami masyarakat akibat kenaikan harga.
8. Penyediaan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terkoordinasi, sehingga tercipta satu data harga yang akurat dan terpercaya.
9. Rapat koordinasi di tingkat teknis perlu dilakukan lebih rutin dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholder lainnya, untuk membahas isu-isu terkini dan merumuskan solusi

yang efektif.

10. Hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas teknis terkait supaya dapat disinkronkan dengan hasil pemantauan Dinas KUKMP dan selanjutnya dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
11. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder (pemangku kepentingan), sebagai pemberi bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah Kota Banjar dalam menyikapi perkembangan fluktuasi harga terkini dan langkah-langkah strategis yang diperlukan.